



EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BPNT (BANTUAN PANGAN NON TUNAI) DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN KPM (KELUARGA PENERIMA MANFAAT) DI SIDOARJO

¹Zahrotul Fathonah & ²Novie Andriani Zakariya

¹Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Kota Surabaya
zahrotulfath@gmail.com

²Universitas Sunan Gresik, Kota Gresik
na.zakariya@lecturer.usg.ac.id

Received: Mei 2026; Revised: Mei 2026; Accepted: Mei 2026; Published: 30 Mei 2026; Available online: Mei 2026

ABSTRACT

Poverty remains a challenge in Indonesia, including in Sidoarjo Regency. In March 2024, the percentage of poor people was recorded at 4.53% or 109,390 people with a poverty line of Rp597,284 per capita per month. The government distributes the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) or the Basic Food Program as a strategy to maintain the food security of Beneficiary Families (KPM). This study aims to evaluate the effectiveness of the BPNT policy in improving the welfare and financial management of KPM households in Sidoarjo Regency. The study uses a qualitative policy research approach with interview, observation, and documentation techniques. The results show that BPNT can reduce food expenditure burdens and provide space for KPM to meet non-food needs and improve basic financial literacy. However, the effectiveness of the program is still hampered by the accuracy of the Integrated Social Welfare Data (DTKS), delays in distribution, and the suboptimal financial empowerment of recipients. In conclusion, BPNT contributes positively to the food and financial security of poor households, but its impact is still short-term.

Keywords: Policy Evaluation, BPNT, KPM Finance, Sidoarjo

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi tantangan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 4,53% atau 109,39 ribu jiwa dengan garis kemiskinan Rp597.284 per kapita per bulan. Pemerintah menyalurkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako sebagai strategi menjaga ketahanan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penelitian ini bertujuan untuk

mengevaluasi efektivitas kebijakan BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan dan manajemen keuangan rumah tangga KPM di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kebijakan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPNT mampu menekan beban pengeluaran pangan dan memberikan ruang bagi KPM untuk memenuhi kebutuhan non-pangan serta meningkatkan literasi keuangan dasar. Namun, efektivitas program masih terkendala akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), keterlambatan distribusi, dan belum optimalnya pemberdayaan finansial penerima. Kesimpulannya, BPNT berkontribusi positif terhadap ketahanan pangan dan keuangan rumah tangga miskin, tetapi dampaknya masih bersifat jangka pendek.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, BPNT, Keuangan KPM, Sidoarjo

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensional yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya terkait dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja (BPS, 2024). Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian terus melakukan intervensi kebijakan untuk menekan angka kemiskinan, antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Secara nasional, BPNT merupakan transformasi dari program Raskin (Beras Sejahtera) yang semula berbasis distribusi beras menjadi bantuan non-tunai yang lebih

fleksibel dan efisien. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019, dengan tujuan utama untuk menjaga ketahanan pangan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat miskin, serta mengurangi beban pengeluaran rumah tangga melalui pemberian bantuan pangan senilai Rp200.000 per bulan. Penyaluran bantuan dilakukan melalui kartu elektronik (Kartu Keluarga Sejahtera) yang dapat digunakan di e-Warung (elektronik warung gotong royong) atau, sejak 2023, dialihkan menjadi bantuan tunai langsung sebagai bagian dari kebijakan adaptif pascapandemi COVID-19.

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari persoalan kesenjangan sosial. Berdasarkan data BPS (2024), jumlah penduduk miskin di

Kabupaten Sidoarjo mencapai 4,53% atau sekitar 109,39 ribu jiwa, dengan garis kemiskinan sebesar Rp597.284 per kapita per bulan. Meski angka ini termasuk rendah dibandingkan kabupaten lain, kondisi ketimpangan sosial dan ketergantungan sebagian masyarakat terhadap program bantuan sosial masih tinggi. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan BPNT di daerah ini menjadi penting untuk dievaluasi sebagai ukuran keberhasilan kebijakan nasional dalam konteks lokal.

Sejak implementasinya, BPNT telah memberikan dampak positif terhadap akses pangan dan daya beli masyarakat miskin (Hidayat & Nisa, 2022; Yusuf & Pramono, 2023). Namun, sejumlah penelitian dan laporan lapangan menunjukkan masih adanya kendala serius dalam pelaksanaannya, seperti keterlambatan pencairan, perbedaan harga barang di e-Warong, keterbatasan pasokan, serta ketidaktepatan sasaran penerima manfaat akibat data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang belum diperbarui secara berkala (Kemensos, 2024). Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo, fenomena ini juga diperkuat oleh hasil wawancara lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian penerima bantuan sudah tidak lagi tergolong miskin, sementara

masyarakat yang layak justru belum terdaftar sebagai penerima.

Selain permasalahan teknis tersebut, dampak BPNT terhadap keuangan keluarga penerima manfaat (KPM) belum banyak dikaji secara mendalam. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek ketahanan pangan (Rachmawati et al., 2021; Yuliani, 2022), sedangkan dimensi manajemen keuangan rumah tangga miskin sebagai konsekuensi kebijakan sosial belum mendapat perhatian yang memadai. Padahal, dalam perspektif kebijakan publik, program bantuan sosial seharusnya tidak hanya bersifat subsidi konsumtif, melainkan juga menjadi stimulus ekonomi keluarga untuk mendorong kemandirian jangka panjang (Subarsono, 2013; Nugroho, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pelaksanaan Program BPNT di Kabupaten Sidoarjo dari perspektif kebijakan publik dan manajemen keuangan keluarga miskin. Melalui analisis model evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003), penelitian ini akan menilai sejauh mana BPNT efektif, efisien, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja kebijakan serta

kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan dan keuangan keluarga penerima manfaat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kebijakan (*policy research*) dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi kebijakan publik, bukan sekadar mendeskripsikan fenomena sosial, melainkan juga menilai sejauh mana kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) efektif, efisien, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna dari perspektif partisipan dan menggali fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan sumber data. Dalam konteks ini, penelitian kebijakan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan dinamika implementasi program BPNT berdasarkan pengalaman dan persepsi para pemangku kepentingan.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif kebijakan, yaitu penelitian yang bertujuan menilai sejauh mana suatu kebijakan publik berjalan sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak yang diharapkan terhadap masyarakat (Subarsono, 2013). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, karena data yang dianalisis bersifat naratif dan menggambarkan realitas pelaksanaan BPNT berdasarkan temuan lapangan dan dokumen kebijakan.

Pendekatan penelitian kebijakan dipilih karena menekankan pada proses analisis kebijakan publik, yang meliputi perumusan, implementasi, dan evaluasi (Dunn, 2003). Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai keberhasilan, efektivitas, dan relevansi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang merupakan salah satu wilayah dengan penerima BPNT terbesar di Jawa Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi (4,53% pada Maret 2024) dan adanya perubahan mekanisme distribusi BPNT dari non-tunai ke tunai. Waktu penelitian berlangsung antara Mei hingga September 2025, mencakup tahap observasi, wawancara, pengumpulan dokumen, serta analisis data.

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga kelompok informan utama, yaitu:

1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima langsung bantuan BPNT.
2. Pendamping Sosial Program BPNT yang bertanggung jawab dalam proses penyaluran dan pengawasan bantuan.
3. Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali persepsi, pengalaman, serta evaluasi para informan terhadap pelaksanaan BPNT. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah seperti laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial (Kemensos), Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019, serta artikel jurnal ilmiah terkait BPNT dan evaluasi kebijakan sosial yang diterbitkan antara tahun 2020–2025

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

Wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap informan terpilih menggunakan pedoman pertanyaan berbasis indikator evaluasi kebijakan Dunn (2003).

1. Observasi lapangan, yaitu pengamatan langsung terhadap pelaksanaan program di lokasi penerima manfaat.
2. Dokumentasi, meliputi pengumpulan dokumen, laporan, dan data statistik terkait BPNT.
3. Studi kepustakaan, dilakukan untuk memperkuat analisis teoretis dan membandingkan temuan penelitian ini dengan hasil studi sebelumnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003) yang mencakup empat kriteria utama:

1. Efektivitas, yaitu sejauh mana kebijakan BPNT mencapai tujuan untuk membantu peningkatan keuangan KPM.
2. Efisiensi, yaitu perbandingan antara manfaat yang diterima dan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Ketepatan sasaran, yaitu keakuratan penetapan penerima manfaat berdasarkan data DTKS.
4. Responsivitas, yaitu sejauh mana kebijakan menanggapi aspirasi dan kebutuhan masyarakat penerima bantuan.

Data dari hasil wawancara ditranskrip, dikodekan, kemudian dianalisis secara tematik sesuai indikator evaluasi tersebut. Proses analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori kebijakan publik (Dunn, 2003; Subarsono, 2013; Nugroho, 2022).

Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari KPM, pendamping sosial, dan pegawai Dinas Sosial. Sementara triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulannya secara sistematis.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menelaah efektivitas kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Sidoarjo menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik William N. Dunn (2003), yang menilai keberhasilan kebijakan berdasarkan empat indikator utama: efektivitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan responsivitas. Temuan di lapangan diperoleh dari wawancara dengan tiga aktor utama—penerima manfaat (KPM),

pendamping sosial, dan pegawai Dinas Sosial—serta analisis dokumen kebijakan dan data sekunder.

Pendekatan tematik terhadap hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan BPNT telah memberikan dampak nyata terhadap pengeluaran rumah tangga, namun masih menyisakan sejumlah persoalan dalam mekanisme implementasi dan respons kebijakan. Analisis berikut menggambarkan temuan utama pada masing-masing indikator evaluasi.

1. Efektivitas Program BPNT dalam Meningkatkan Keuangan KPM

Efektivitas kebijakan publik mengacu pada sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2003). Dalam konteks BPNT, efektivitas diukur melalui kemampuan program dalam menurunkan beban pengeluaran pangan dan meningkatkan daya beli keluarga penerima manfaat.

Hasil wawancara dengan penerima manfaat menunjukkan bahwa BPNT memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan finansial jangka pendek. Seorang penerima menyatakan:

“Dulu kami sering kekurangan beras setiap bulan, tapi sejak dapat bantuan, uang belanja bisa dipakai untuk kebutuhan lain seperti sekolah anak atau listrik.” (Wawancara dengan Ibu SH, 2025)

Temuan ini sejalan dengan data nasional Kementerian Sosial

(2024) yang menunjukkan bahwa 86% KPM menggunakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, sementara 14% sisanya mengalokasikan sebagian pengeluaran untuk keperluan non-pangan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Yusuf dan Pramono (2023) bahwa BPNT meningkatkan kemampuan rumah tangga miskin dalam menstabilkan pengeluaran bulanan, terutama di wilayah perkotaan.

Efektivitas BPNT juga ditunjukkan dari persepsi masyarakat yang merasa bantuan tersebut membantu menjaga stabilitas ekonomi keluarga, terutama saat harga pangan meningkat. Namun, efektivitas program belum maksimal karena ketidakteraturan jadwal pencairan. Sejumlah penerima melaporkan keterlambatan distribusi hingga dua atau tiga bulan. Hal ini berdampak terhadap ketidakpastian ekonomi rumah tangga, sebagaimana juga dilaporkan oleh Hartati dan Putra (2023) bahwa ketidakkonsistenan jadwal distribusi menurunkan efektivitas kebijakan sosial di tingkat daerah.

Dalam perspektif evaluasi kebijakan Dunn (2003), kebijakan yang efektif seharusnya mencapai *policy output* yang stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun BPNT di Sidoarjo tergolong efektif dalam mencapai tujuan jangka pendek, stabilitas

waktu pencairan dan pengawasan penggunaan dana masih perlu diperkuat agar kebijakan lebih berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan finansial KPM secara jangka panjang.

2. Efisiensi Pelaksanaan Program BPNT

Efisiensi dalam evaluasi kebijakan mencerminkan perbandingan antara hasil kebijakan dengan sumber daya yang digunakan untuk mencapainya (Dunn, 2003; Subarsono, 2013). Perubahan sistem BPNT dari *e-Warong* berbasis non-tunai ke sistem tunai langsung merupakan langkah kebijakan yang secara nyata meningkatkan efisiensi administrasi dan pelaksanaan program.

Berdasarkan wawancara dengan pendamping sosial:

"Sekarang lebih cepat dan mudah. Dulu warga harus antre lama di e-Warong, kadang barangnya habis atau harganya beda-beda. Sekarang tinggal tarik uang dan belanja di mana pun." (Wawancara dengan Pendamping BPNT, 2025)

Transformasi kebijakan tersebut mengurangi potensi penyimpanan harga dan mempercepat proses distribusi. Hasil penelitian ini mendukung temuan Novianti (2022) dan Sari dan Widodo (2022) bahwa sistem tunai lebih efisien dibandingkan sistem *voucher* karena mengurangi beban administratif dan

memperluas fleksibilitas konsumsi penerima.

Selain itu, efisiensi pelaksanaan BPNT di Sidoarjo terlihat dari berkurangnya biaya operasional dan waktu distribusi. Pegawai Dinas Sosial menyebutkan bahwa penggunaan bank penyalur digital mempercepat transfer bantuan dan meminimalkan kesalahan teknis.

Namun, efisiensi dari sisi administratif masih menghadapi kendala dalam proses verifikasi data penerima. Proses validasi manual yang panjang sering kali menyebabkan keterlambatan pembaruan data DTKS, sebagaimana diungkapkan oleh Rahman dan Fitriani (2023) yang menekankan pentingnya integrasi sistem data digital dalam penyaluran bantuan sosial.

Secara keseluruhan, pelaksanaan BPNT di Kabupaten Sidoarjo dapat dikategorikan efisien dari sisi pelaksanaan teknis dan alur distribusi, tetapi masih perlu optimalisasi efisiensi administratif melalui pembaruan sistem data dan pengawasan digital secara real-time.

3. Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat

Ketepatan sasaran merupakan komponen kunci dalam evaluasi kebijakan sosial karena menentukan legitimasi dan efektivitas kebijakan publik (Nugroho, 2022). Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa masih ada penerima BPNT

yang tidak lagi memenuhi kriteria miskin, sementara sebagian masyarakat yang lebih layak justru belum terdaftar.

Pendamping sosial menyampaikan:

“Ada warga yang sudah punya usaha sendiri tapi masih dapat bantuan, sementara tetangga yang lebih susah belum dapat karena belum masuk data DTKS.” (Wawancara, 2025)

Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam akurasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo membenarkan bahwa pembaruan data terakhir dilakukan pada 2023, dan sejak itu belum ada verifikasi lanjutan di tingkat daerah.

Temuan ini sejalan dengan studi Amalia dan Nugraha (2021) serta Kusumawati et al. (2023) yang menemukan bahwa akurasi data merupakan tantangan utama program bantuan sosial nasional. Keterlambatan pembaruan data menyebabkan kebijakan kehilangan relevansi dan efektivitasnya karena tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat terkini.

Dalam kerangka teori Dunn (2003), ketepatan sasaran terkait langsung dengan *adequacy* dan *appropriateness* kebijakan, yaitu sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan kelompok sasaran yang tepat. Berdasarkan analisis, pelaksanaan BPNT di Sidoarjo tergolong kurang tepat

sasaran karena keterlambatan pembaruan data dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses validasi penerima.

Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi sistem pendataan berbasis digital dan partisipatif, di mana masyarakat lokal dapat berperan dalam mengusulkan calon penerima bantuan secara transparan melalui mekanisme musyawarah desa atau sistem verifikasi daring.

4. Responsivitas Kebijakan terhadap Kebutuhan Masyarakat

Responsivitas menggambarkan sejauh mana kebijakan publik mampu menanggapi kebutuhan, aspirasi, dan keluhan masyarakat penerima manfaat (Dunn, 2003). Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat penerima mengaku puas terhadap mekanisme penyaluran tunai karena lebih cepat dan fleksibel. Namun, belum terdapat sistem umpan balik formal untuk menampung keluhan masyarakat.

Seorang KPM menyampaikan:

“Kalau ada kendala, kami lapor ke pendamping. Tapi kadang ditindaklanjuti lama karena tidak ada petugas khusus untuk BPNT.” (Wawancara dengan KPM, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dari sisi penerimaan masyarakat program BPNT sudah baik, tetapi secara kelembagaan belum terdapat mekanisme komunikasi dua arah yang memadai. Subarsono (2013)

menekankan bahwa responsivitas merupakan dimensi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian Sari dan Widodo (2022) serta Hartati dan Putra (2023) yang menyatakan bahwa rendahnya responsivitas sering kali disebabkan oleh tidak adanya sistem pengaduan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan secara langsung.

Responsivitas yang rendah juga berdampak pada akuntabilitas kebijakan, karena pemerintah kesulitan memperoleh masukan langsung dari penerima manfaat. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah membentuk unit layanan pengaduan masyarakat khusus BPNT dan menyediakan aplikasi berbasis daring untuk menampung keluhan dan laporan penerima secara cepat dan transparan.

5. Dampak BPNT terhadap Kondisi Keuangan dan Kemandirian KPM

Dampak kebijakan merupakan ukuran sejauh mana kebijakan publik menghasilkan perubahan nyata dalam kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat. BPNT terbukti memberikan dampak positif terhadap pengeluaran rumah tangga miskin, terutama dalam mengurangi beban pengeluaran pangan.

Seorang penerima manfaat menyatakan:

“Sekarang kebutuhan makan sudah terbantu. Jadi bisa sisihkan uang sedikit untuk keperluan lain seperti sekolah anak atau beli gas.”

(Wawancara dengan KPM, 2025)

Penurunan beban pengeluaran pangan memungkinkan alokasi dana untuk kebutuhan produktif lainnya. Hal ini mendukung teori *income substitution effect* (OECD, 2021), yang menyebutkan bahwa bantuan pangan dapat meningkatkan kapasitas keuangan rumah tangga melalui penghematan pengeluaran dasar. Namun, temuan ini juga memperlihatkan bahwa dampak tersebut masih bersifat jangka pendek. Program BPNT belum mendorong transformasi ekonomi rumah tangga karena tidak disertai dengan program pemberdayaan ekonomi lanjutan. Sejalan dengan penelitian Hartati dan Putra (2023) serta Supriyanto et al. (2022), bantuan sosial yang tidak diintegrasikan dengan pelatihan kewirausahaan cenderung menghasilkan ketergantungan baru terhadap bantuan pemerintah.

Untuk menciptakan dampak keuangan yang berkelanjutan, program BPNT perlu diintegrasikan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Usaha Mikro (BUMDes), atau program pemberdayaan perempuan agar penerima dapat mengelola bantuan secara

produktif. Dengan demikian, BPNT tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga menjadi katalis pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.

6. Sintesis Evaluasi Kebijakan BPNT di Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan keempat indikator yang dianalisis, kebijakan BPNT di Kabupaten Sidoarjo dapat dikategorikan cukup berhasil. Program ini efektif dan efisien dalam membantu KPM memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi pengeluaran pangan, tetapi masih menghadapi hambatan serius dalam hal ketepatan sasaran dan responsivitas.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang baik tidak cukup hanya fokus pada distribusi bantuan, tetapi harus diiringi dengan mekanisme pendataan yang akurat, komunikasi publik yang responsif, dan integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi.

Sejalan dengan pandangan Nugroho (2022), kebijakan sosial yang berkelanjutan harus bersifat *adaptive*, yaitu mampu menyesuaikan mekanisme pelaksanaan berdasarkan perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan BPNT di masa depan sangat bergantung pada inovasi kebijakan yang menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga

sebagai aktor aktif dalam sistem kebijakan sosial.

Selain menekan beban pengeluaran pangan, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga memiliki implikasi nyata terhadap manajemen keuangan rumah tangga Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan hasil wawancara, sebagian penerima manfaat menyatakan bahwa setelah memperoleh bantuan sebesar Rp200.000 per bulan, mereka dapat mengalokasikan sebagian pendapatan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan anak, perawatan kesehatan, pembelian bahan bakar, serta dana tabungan darurat. Sebagian kecil informan bahkan menyebutkan bahwa selisih pengeluaran pangan digunakan sebagai modal usaha mikro, misalnya membuka warung kecil, menjual makanan ringan, atau membeli peralatan untuk kegiatan produktif di rumah. Hal ini memperlihatkan bahwa bantuan sosial dapat berfungsi ganda, tidak hanya sebagai instrumen konsumsi tetapi juga sebagai modal keuangan mikro (micro-financial capital) bagi rumah tangga miskin ketika disertai pengetahuan pengelolaan keuangan yang memadai [(Mahendra & Sari, 2023); (Supriyanto, Lestari, & Wibowo, 2022)].

Lebih jauh, hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan pola perilaku finansial (financial

behavior) di kalangan KPM. Sebagian penerima mulai menerapkan prinsip prioritas kebutuhan dan menghindari pemborosan setelah mendapatkan pendampingan dari aparat desa maupun pendamping sosial. Perubahan ini menunjukkan efek positif kebijakan BPNT terhadap pembentukan kesadaran ekonomi rumah tangga, khususnya dalam aspek pengelolaan pengeluaran, perencanaan kebutuhan, dan penciptaan cadangan keuangan rumah tangga miskin [(Putri & Santoso, 2024)]. Meskipun nominal bantuan relatif kecil, efek psikologis dari kepastian penerimaan setiap bulan memberikan rasa aman (financial security) yang memengaruhi stabilitas pengeluaran rumah tangga.

Namun demikian, kemampuan pengelolaan keuangan antar-KPM masih sangat bervariasi. Tidak semua penerima memiliki literasi keuangan yang memadai untuk mengelola bantuan secara produktif. Beberapa informan mengaku bantuan sering kali habis dalam waktu singkat karena tidak adanya perencanaan keuangan yang jelas, serta lemahnya kebiasaan menabung. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemberdayaan keuangan keluarga miskin (financial empowerment) sebagai pelengkap kebijakan BPNT. Pelatihan sederhana seperti pencatatan keuangan rumah

tangga, perencanaan kebutuhan bulanan, pengenalan tabungan mikro, serta edukasi penggunaan layanan keuangan digital (misalnya e-wallet subsidi dan tabungan mikro BRI Link) dapat meningkatkan keberlanjutan dampak bantuan sosial terhadap kemandirian ekonomi [(Novianti, 2022); (Utami & Hapsari, 2024)].

Dari perspektif kebijakan publik, sinergi lintas sektor antara Kementerian Sosial (Kemensos), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlukan untuk mengembangkan pendekatan baru dalam pengelolaan bantuan sosial yang tidak hanya berorientasi pada konsumsi, tetapi juga pada penguatan kapasitas finansial keluarga miskin. Dengan demikian, BPNT dapat berevolusi dari sekadar program perlindungan sosial menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi mikro yang berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan inklusif nasional 2025 [(Nugroho, 2022); (Bappenas, 2022)].

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan model evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Sidoarjo telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan

keuangan keluarga penerima manfaat (KPM), namun efektivitasnya masih bersifat parsial dan jangka pendek.

Selain itu, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa pelaksanaan BPNT tidak hanya berdampak pada peningkatan konsumsi pangan, tetapi juga pada perubahan perilaku keuangan rumah tangga KPM. Sebagian penerima menunjukkan kemampuan baru dalam mengatur pengeluaran, menabung, serta memanfaatkan sebagian dana bantuan untuk kegiatan produktif rumah tangga. Meskipun efeknya masih terbatas, hal ini mencerminkan potensi program BPNT untuk memperkuat *financial literacy* dan *financial empowerment* keluarga miskin apabila diintegrasikan dengan edukasi keuangan dan program pemberdayaan ekonomi lokal.

Dari aspek efektivitas, BPNT terbukti membantu menekan pengeluaran pangan rumah tangga miskin dan menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Program ini juga memberi ruang bagi penerima untuk memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, ketidakteraturan pencairan bantuan masih menjadi kendala utama yang menghambat stabilitas manfaat program.

Dari aspek efisiensi, perubahan mekanisme penyaluran dari sistem e-Warong menuju sistem tunai secara langsung

meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya distribusi. Mekanisme baru ini juga meminimalkan potensi penyimpangan harga dan memperkuat transparansi. Meskipun demikian, efisiensi administratif masih lemah karena sistem verifikasi data penerima belum sepenuhnya digital dan terintegrasi.

Dari aspek ketepatan sasaran, ditemukan bahwa sebagian penerima tidak lagi tergolong miskin, sedangkan masyarakat rentan lainnya belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan data secara berkala serta pelibatan masyarakat dalam proses validasi agar kebijakan lebih adil dan akurat.

Sementara itu, dari aspek responsivitas, penerima merasa puas dengan mekanisme baru berbasis tunai, tetapi belum terdapat sistem pengaduan atau komunikasi dua arah yang efektif antara masyarakat dan penyelenggara program. Kurangnya saluran umpan balik ini berpotensi menurunkan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan.

Secara keseluruhan, implementasi BPNT di Kabupaten Sidoarjo dapat dikategorikan cukup efektif dan efisien, namun kurang responsif dan belum sepenuhnya tepat sasaran. Dampaknya

terhadap keuangan rumah tangga miskin bersifat jangka pendek, belum mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Akurasi dan Pembaruan Data DTKS

Pemerintah perlu melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala, minimal dua kali dalam setahun, melalui koordinasi antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan pendamping sosial. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa dalam verifikasi data juga dapat meningkatkan keadilan dan transparansi penerima bantuan.

2. Penguatan Sistem Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat

Diperlukan sistem pengaduan berbasis digital yang memungkinkan penerima manfaat melaporkan kendala secara langsung melalui aplikasi atau layanan daring. Hal

ini akan meningkatkan responsivitas kebijakan serta membantu pemerintah dalam menilai efektivitas pelaksanaan program secara real-time.

3. Integrasi Program BPNT dengan Program Pemberdayaan Ekonomi

Agar manfaat BPNT tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan konsumtif, program ini perlu diintegrasikan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Usaha Mikro (BUMDes), atau pelatihan kewirausahaan. Integrasi lintas program akan memperkuat kemandirian ekonomi dan menurunkan ketergantungan terhadap bantuan sosial.

4. Peningkatan Kapasitas Pendamping Sosial dan Pengawasan Lapangan

Pemerintah daerah perlu meningkatkan jumlah dan kapasitas pendamping sosial yang khusus menangani BPNT agar pemantauan di lapangan lebih optimal. Selain itu, mekanisme pengawasan berbasis masyarakat dapat diaktifkan untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan sesuai prosedur.

5. Evaluasi Kebijakan Berkelanjutan dan Adaptif

Kebijakan BPNT perlu dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Mengacu pada pandangan Nugroho (2022), kebijakan sosial yang adaptif harus mampu bertransformasi dari sekadar program bantuan menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki dua implikasi utama:

1. Implikasi teoretis, yaitu memperkuat relevansi model evaluasi kebijakan Dunn (2003) dalam konteks kebijakan sosial di Indonesia, khususnya dalam menilai efektivitas dan efisiensi program bantuan berbasis tunai.
2. Implikasi praktis, yaitu memberikan rekomendasi nyata bagi pemerintah daerah dan Kementerian Sosial untuk memperbaiki sistem pendataan, distribusi, dan pengawasan BPNT agar lebih berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Nugraha, Y. (2021). Evaluasi Ketepatan Sasaran Program Bantuan

- Sosial Non Tunai di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan*, 12(2), 87-99.
- Anisa, R., & Nurhayati, S. (2022). Analisis Dampak Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Jawa Timur. *Jurnal Sosiohumaniora*, 24(3), 145-158.
- Astuti, F., & Raharjo, B. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 55-67.
- Bappenas. (2022). *Laporan Evaluasi Program Perlindungan Sosial Indonesia 2022*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- BPS. (2024). *Statistik Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall.
- Fitriani, N., & Rahman, M. (2023). Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Implementasi Program BPNT. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(4), 301-316.
- Hartati, L., & Putra, D. (2023). Evaluasi Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Jawa Tengah. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 10(2), 112-126.
- Hidayat, S., & Mulyono, E. (2021). Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui Program Sembako di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 17(1), 65-79.
- Huda, M., & Lestari, A. (2022). Evaluasi Kinerja Kebijakan Sosial di Era Digitalisasi Data Bantuan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 9(3), 223-238.
- Indrawan, A., & Rachmawati, L. (2020). Efisiensi Pelaksanaan Program BPNT Berbasis Non Tunai di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Sosial*, 7(2), 97-110.
- Kementerian Sosial RI. (2024). *Profil Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Kusumawati, D., & Prasetyo, B. (2023). Tantangan Akurasi Data dan Ketepatan Sasaran Program Perlindungan Sosial di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora dan Kebijakan Publik*, 5(1), 34-49.
- Larasati, M., & Sudirman, D. (2022). Evaluasi Implementasi Program

- Bantuan Sosial di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 102–116.
- Mahendra, A., & Sari, E. (2023). Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Pengeluaran Rumah Tangga di Jawa Timur. *Jurnal Pembangunan Daerah dan Inovasi Kebijakan*, 6(4), 211–227.
- Novianti, I. (2022). Efisiensi dan Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Sosial*, 15(3), 178–190.
- Nugroho, R. (2022). *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis dan Manajemen Implementasi di Indonesia* (6th ed.). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- OECD. (2021). *Income Substitution and Food Security Impacts of Cash Transfer Programs in Developing Countries*. Paris: OECD Publishing.
- Pramono, H., & Yusuf, R. (2023). Analisis Efektivitas Program BPNT terhadap Pengeluaran Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen Sosial*, 9(1), 45–58.
- Putri, D., & Santoso, A. (2024). Integrasi Program Bantuan Pangan dengan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Sosial dan Pembangunan Ekonomi, 11*(2), 97–112.
- Rachmawati, N., & Hidayah, U. (2021). Analisis Efisiensi dan Keadilan Program BPNT di Jawa Barat. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Sosial*, 8(3), 233–248.
- Rahman, M., & Fitriani, N. (2023). Digitalisasi Data DTKS untuk Efisiensi Penyaluran BPNT. *Jurnal Transformasi Kebijakan Publik*, 10(1), 75–90.
- Sari, N., & Widodo, T. (2022). Responsivitas Pemerintah dalam Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai di Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Sosial*, 13(2), 156–169.
- Sari, R., & Nugroho, D. (2020). Evaluasi Implementasi Program BPNT di Daerah Perkotaan. *Jurnal Sosial dan Pemerintahan*, 7(2), 120–137.
- Subarsono, A. G. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriyanto, A., Lestari, S., & Wibowo, M. (2022). Dampak Program BPNT terhadap Kemandirian Ekonomi Keluarga Miskin. *Jurnal Ekonomi Sosial Humaniora*, 10(4), 188–203.
- Susanti, H., & Raharjo, A. (2021). Evaluasi Efektivitas Program Perlindungan Sosial di Era Pandemi. *Jurnal Pemberdayaan dan*

- Kebijakan Sosial*, 6(3), 145–158.
- Taufiq, R., & Handayani, E. (2023). Efektivitas Bantuan Tunai terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Jawa Timur. *Jurnal Ketahanan Sosial*, 14(2), 77–89.
- UNDP. (2021). *Social Protection and Economic Inclusion in Southeast Asia*. New York: United Nations Development Programme.
- Utami, D., & Hapsari, L. (2024). Digitalisasi Kebijakan Sosial: Tantangan dan Peluang pada Program Bantuan Pangan. *Jurnal Inovasi Kebijakan Publik*, 9(3), 202–219.
- Wahyuni, R., & Siregar, M. (2020). Pengaruh Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, 5(1), 33–48.
- Wardani, D., & Prasetyo, H. (2022). Analisis Efisiensi dan Responsivitas Program BPNT di Wilayah Urban. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Sosial*, 11(1), 62–80.
- Widyaningrum, E., & Puspitasari, T. (2024). Reformasi Sistem Bantuan Sosial melalui Integrasi Data Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Transformasi Kebijakan Sosial*, 12(3), 188–204.
- Wijayanti, R., & Arifin, M. (2021). Dampak Sosial-Ekonomi Program Sembako terhadap Rumah Tangga Miskin. *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Sosial*, 8(2), 89–104.
- World Bank. (2022). *Indonesia Social Assistance Reform Program Evaluation*. Washington D.C.: World Bank Publications.
- Yuliana, R., & Setyawan, P. (2020). Evaluasi Kinerja Program BPNT pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan Sosial*, 7(4), 201–215.
- Yusuf, M., & Pramono, H. (2023). Efektivitas dan Efisiensi Program BPNT dalam Mengurangi Kemiskinan. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Pembangunan*, 14(1), 55–70.
- Zakariya, N. A. (2023). Evaluasi Kebijakan Sosial di Indonesia: Pendekatan Model Dunn. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 8(3), 299–314.
- Zulfa, N., & Hidayat, D. (2025). Ketepatan Sasaran dan Tantangan Implementasi Program Bantuan Sosial di Indonesia. *Jurnal Reformasi Kebijakan Publik*, 6(1), 33–48.